



Pemkot Menyasar Indekos Eksklusif

■ Banyak Induk Semang Tak Peduli Penghuni Pondokan
 ■ Perda Penyelenggaraan Pemandokan Dinilai Tak Efektif

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyasar tempat indekos eksklusif, guna memantau aktivitas yang terjadi di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat menghadiri Dialog Interaktif "Ngobrol Pendidikan Islam" (Ngopi) 2018 di MAN 1 Kota Yogyakarta, Rabu (29/8).

● ke halaman 19

Perda sudah mengatur bagaimana tata cara dan kelola menyelenggarakan pondokan. Ini agar masyarakat aware. Jadi tidak dibiarkan (pondokan) bebas. Sudah ada aturannya.

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta

PONDOKAN SEHAT

- Masyarakat harus aware, dengan tak biarkan pondokan itu bebas. Sudah ada aturannya
- Indekos eksklusif itu sesuai dengan keamanan, tapi tak berarti aman melakukan apa saja
- Wali Kota minta camat-lurah se-Kota kembali gencar turun lapangan sosialisasikan Perda
- Induk semang harus menggunakan Perda itu sebagai dasar menjalankan bisnis pondokan
- Yogyakarta harus beri nuansa belajar dan tempat tinggal nyaman bagi pelajar luar kota
- Lingkungan buruk itu saat warga membiarkan perilaku seks bebas, narkoba, dan miras
- Selain itu, perilaku yang tidak agamis terjadi tanpa adanya kontrol masyarakat sekitar

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

GRAFIS/FAUZIA RAHMAN

Pemkot Menyasar Indeks Eksklusif

● Sambungan Hal 13

Haryadi menyebut, telah ada peraturan terkait pemondokan, indeks atau asrama yang tertuang dalam Perda 1/2017 tentang Penyelenggaraan Pemandokan.

Namun ia merasa, Perda itu belum cukup efektif, karena masih banyak induk semang yang tak peduli dengan penghuni pondok.

"Perda sudah mengatur bagaimana tata cara dan kelola menyelenggarakan pondokan. Ini agar masyarakat *aware*. Jadi tidak dibiarkan (pondokan) bebas. Sudah ada aturannya," ungkapnya.

Ia pun mengatakan, sasaran utamanya adalah tempat indeks berlabel eksklusif. Haryadi menegaskan, kata eksklusif tersebut harus sesuai dengan keamanan, baik aman secara lingkungan maupun sosial. "Bukan berarti aman mau melakukan apa saja. Bukan begitu," tegasnya.

Ia pun meminta agar para camat dan lurah se-Kota Yo-

gyakarta untuk kembali gencar turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pondokan tersebut. Harapannya, para induk semang bisa menggunakan Perda tersebut sebagai dasar untuk menjalankan bisnis pondokan atau indeks mereka.

"Induk semang harus bertanggung jawab terkait pengelolaannya. Kalau ada pengelola, kami bisa melakukan langkah-langkah agar tidak jadi perilaku negatif yang menimbulkan keresahan masyarakat," ujarnya.

Haryadi berharap, Kota Pendidikan yang menjadi predikat Kota Yogyakarta tidak hanya memberikan nuansa belajar yang nyaman namun juga menciptakan tempat tinggal yang nyaman, khususnya bagi pelajar yang datang dari luar kota.

"Harus ada tempat belajar yang bagus dan tempat tinggal yang bagus bukannya lingkungan yang buruk. Lingkungan buruk adalah di mana masyarakat membiarkan perilaku seks bebas, narkoba, miras, dan perilaku yang tidak agamis terjadi tanpa adanya kontrol mas-

yarakat," ungkapnya.

Kekhawatiran orangtua

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sigit Warsita menjelaskan bahwa pada kegiatan tersebut pihaknya akan menginventarisasi masukan mengenai apa yang bisa dilakukan kepada pelajar dan mahasiswa yang belajar di Kota Yogyakarta.

"Kami mengambil tema Belajar di Kota, Tinggal di Pondok. Kota Yoga ini destinasi pendidikan. Tapi ada kekhawatiran orangtua yang jauh di sana terkait pergaulan yang mengkhawatirkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah pernikahan dini di Kota Yogyakarta cukup banyak. Hampir seluruhnya merupakan kasus hamil sebelum menikah.

"Banyak telepon yang masuk ke kami, mau melahirkan, anaknya mau dititipkan ke kami. Itu *kari* bagian dari kekhawatiran kami tentang pergaulan di kota sehingga pada kegiatan ini diharapkan ada masukan yang bisa menyelamatkan generasi penerus bangsa," bebernya. (kur)

Mimpi Asrama Bernuansa Agamis

KEPALA Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sigit Warsita menjelaskan, jumlah pondok pesantren di Kota Yogyakarta yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama sejumlah 33 pondok pesantren.

● ke halaman 19

Mimpi Asrama Bernuansa

● Sambungan Hal 13

Selain pondok pesantren tersebut, pihaknya juga berupaya untuk menjadikan tempat indekos maupun asrama di Kota Kota Yogyakarta, agar dapat kental dengan nuansa pendidikan agama.

"Kalau dalam indekos atau asrama isinya Muslim, maka harapannya bisa ada tempat salat berjamaah, ada kajian agama, ada ustaz atau ustazah, dan seterusnya," ujarnya.

Hal serupa juga dijelaskan Sigit bisa berlaku bagi pelajar maupun mahasiswa yang beragama lain. Misalnya dengan rutin mendatangkan pemuka agama atau menga-

dakan kegiatan peribadatan di asrama atau indekos tersebut.

"Ada banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia belajar di sini. Kemarin sudah ngobrol dengan Pak Wali (Wali Kota), beliau mendukung. Perda indekos sudah ada, harapannya ada Perwal yang bisa mengatur soal kegiatan agama tadi," ungkapnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. TP. PKK/ Dekranasda	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kan. Depag/Kan. Kemenag			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005